

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Analisis Yuridis Pemilihan Pengurus Koperasi Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Perspektif *Syura* (Studi Kasus Pemilihan Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat) dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor Pemilihan Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang adalah ingin menguasai kekuasaan hak seluruh anggota untuk kelompok-kelompok yang rakus terhadap dana-dana anggota koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan pengurus di Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pemilihan pengurus tidak dilakukan dalam forum Rapat Anggota sebagaimana diamanatkan Pasal 29, bahkan sebagian besar anggota tidak diundang dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pengurus yang terpilih bukan berasal dari anggota koperasi dan tidak tercatat dalam buku daftar anggota, sehingga melanggar Pasal 17-19 mengenai syarat keanggotaan. Pemilihan dilakukan secara sepihak, tidak melalui musyawarah, dan tidak memenuhi prinsip keterbukaan serta demokratis sebagaimana dipertegas dalam Permenkop UKM No. 19/2015. Kondisi ini mengakibatkan cacat hukum pada proses pemilihan dan melemahkan legitimasi kepengurusan koperasi.
2. Penelitian menunjukkan bahwa praktik pemilihan pengurus koperasi tidak mencerminkan prinsip *syura* yang menekankan nilai musyawarah, keadilan, keterbukaan, dan partisipasi anggota. Musyawarah tidak dilaksanakan secara inklusif, hak anggota untuk

menyampaikan pendapat ditekan, dan keputusan hanya ditentukan oleh kelompok kecil yang berkepentingan. Situasi ini bertentangan dengan prinsip syura sebagai mekanisme penyelesaian urusan publik yang menuntut proses konsultatif, adil, dan bebas dari pemaksaan. Hilangnya nilai syura mengakibatkan kepemimpinan tidak lagi menjadi amanah, munculnya ketidakadilan, perpecahan di antara anggota, serta penyalahgunaan kewenangan oleh pengurus. Secara normatif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemilihan pengurus koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Menjunjuang Bilang tidak memenuhi prinsip syura baik secara prosedural maupun substansial.

5.2. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, berikut penulis sampaikan saran bahwa Dinas Koperasi dan Perdagangan Pasaman Barat sebagai instansi yang membina dan sebagai wadah koperasi-koperasi yang berada dibawah naungan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KOPERINDAG) harus lebih tegas dalam membina koperasi yang melanggar undang-undang dalam pemilihan pengurus koperasi. Selain itu, anggota koperasi selaku pemegangan hak kekuasaan tidak boleh takut kepada pengurus yang tidak pilih dari anggota koperasi karena itu akan membuat anggota koperasi lemah bila akan terjadi Rapat Anggota Tahunan (RAT). Untuk PT sebagai pihak ketiga tidak boleh menerima surat dari pengurus koperasi yang tidak dipilih dari anggota koperasi karena di MOU ada pihak kelompok tani dalam hal mencairkan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, G. S., Suryadi, & Mochammad, R. (2022). Penerapan Syura Dalam Kepemimpinan Publik (Studi Di Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 257–263.
- Akhmad Nazaruddin, D. H., Yulia, M. M., Putri, H., Lina, M. S., & Siregar, D. (2021). Manajemen Koperasi. In *Manajemen Koperasi*.
- Alderson, J. Charles & Wall, D. (1992). uu 25 tahun 1992. *Japanese Society of Biofeedback Research*, 19, 709–715. https://doi.org/10.20595/jjbf.19.0_3
- Anam, M. (2021). *Implementasi Prinsip Syura dan Good Governance Dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2024 (Studi di KPU Kota Malang)*.
- Antoni, V., & Razaga, A. F. (2024). Permasalahan Hukum Pada Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 10(1), 179–201. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7801>
- Arista, W., Absi, W. Z., Rusniati, & Hendri. (2021). *Hukum Koperasi* (T. O. Peronika (ed.)). Yayasan Pendidikan Cendikia Islam.
- Efendi, S. (2024). Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam. *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research*, 3(1), 69–78. <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i1.3455>
- Fatimah dan Darna. (2011). Peranan Koperasi Dalam Mendukung Permodalan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 127–138.
- Fithri Azizah. (2022). *SEJARAH GERAKAN KOPERASI DI DUNIA DAN DI INDONESIA* Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Koperasi Syariah dan UMKM dengan Dosen Pengampu Dra. Hj. Nuraeni Gani, MM.
- Hanisa, I., Sunny, D., & Firdaus, U. (2023). Dinamika Demokrasi dalam Kebijakan Publik: Tantangan dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 2(4), 340–353. [http://repository.upstegal.ac.id/4718/1/Taufik Moh_Hukum Kebijakan Publik.pdf](http://repository.upstegal.ac.id/4718/1/Taufik%20Moh_Hukum%20Kebijakan%20Publik.pdf)

- Irawansah, D., Khas, A., Muliya, S., & Bima, U. M. (2025). Perspektif Hukum : Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Untuk Menuju Kemandirian Koperasi Indonesia LEGAL PERSPECTIVE : Protection and Empowerment of Cooperatives Toward Indonesian Cooperative Independence. *Journal Of Excellence Humanities And Religious*, 2(1), 133–143.
- Kalsum, U., Permana, A., Sahri, Y., Hidayat, R., Febriani, Y., & Kosim, B. (2023). Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi Bagi Pengurus Dan Pengawas Koperasi. *Suluh Abdi*, 5(2), 79. <https://doi.org/10.32502/sa.v5i2.6333>
- Massi, R. A. R. (2020). Syura dan Legitimasi Umat dalam Suksesti Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 95–113.
- Nugroho, H. (2015). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419>
- Rahmi, N. (2022). Konsep Syura Dalam Pengambilan Keputusan (Studi Tentang Persamaan Dan Perbedaan Menurut Hukum Tata Negara Islam Dan Hukum Tata Negara Indonesia). In *IAIN Batu Sangkar* (Vol. 33, Issue 1).
- Rambe, T., & Mayasari, S. (2021). Komparasi antara Konsep Syura dan Demokrasi dalam Politik Islam. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 138–148. <https://doi.org/10.30743/mkd.v5i1.3313>
- Rasyidi, M. A. (2022). Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia. *Jurnal M-Progress*, 8(1), 148–165.
- Rizkiawan, T. (2023). Model Lembaga Pengawasan Koperasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat. *Jurnal Lex Renaissance*, 8(2), 346–359. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss2.art9>
- Ryan Irwansyah Pasaribu, & Kusmilawaty Kusmilawaty. (2024). Analisis Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(2), 359–368. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i2.2940>

- Santoso, L. (2013). Eksistensi Prinsip Syura Dalam Konstitusional Islam. *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 3(1), 113–134. <http://www.anneahira.com/aliran->
- Siti Indah Purwaning Yuwana. (2021). Strategi Pengembangan Modal Koperasi Simpan Pinjam Melalui Bantuan LPDB. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(3), 35–48. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i3.400>
- Sohrah. (2015). Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Ayat-ayat Al-Qur'an). *Al-Daulah*, 4(1), 197–212.
- Sutopo, I., & Gunawati, E. S. (2008). Koperasi Indonesia Dalam Perekonomian Yang Kompetitif Dan Pasar Bebas. *Eko Regional*, 3(2), 103–110.
- Syabrinildi, S. (2023). Analisis Kerangka Hukum dan Peraturan Yang Mempengaruhi Manajemen Koperasi. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 3(12), 1228–1234. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i12.1084>
- Syaiful, M. (2019). *Kesejahteraan Anggota Koperasi*. 2(3), 10–20.
- Usman, M., Ispriyarso, B., Notaris, K., Miryani Usman, P., Kebayoran Baru, S., Selatan, J., & Jakarta, D. (2024). Koperasi Model Multipihak Sebagai Perwujudan Pembentukan Koperasi Modern di Indonesia. *Notarius*, 17, 974–994.
- Yoga, P. (2019). *Pelaksanaan Pengawasan Koperasi oleh Dinas Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang*. <https://repository.uin-suska.ac.id/24870/>
- Zulhartati, S. (1992). Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia. In *Universitas Tanjungpura* (Vol. 19). https://doi.org/10.20595/jjbf.19.0_3